

**PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011**
(Rina Permata Sari, 0810112485, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah
Halaman 65+vii, tahun 2012).

ABSTRAK

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan juga mencerminkan program kegiatan tahunan pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011, kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pengusulan, tahap pembahasan dan tahap penetapan APBD. Kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran antara lain pemerintah daerah yang belum taat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya transisi pemerintahan, pemilukada dua putaran dan kurangnya partisipasi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembahasan APBD. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, yaitu: membuat matrik kegiatan tahunan, peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan peran serta anggota DPRD dalam pembahasan APBD dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai penjadwalan pembahasan APBD. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi anggaran, diharapkan kepada pemerintah daerah dan anggota DPRD agar menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan APBD.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karuniaNya itulah, penulis diberi kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua, Ayahanda Muzni dan Ibunda Darmiwati, atas dorongan semangat, cinta, do’a dan seluruh kasih sayang yang tak pernah henti dicurahkan kepada penulis dan buat kakakku Hengki Esa Putra S.T, Doni Wahyudi S.T, Yora Fitriani S.Pd, dan kakak iparku Tirta Sari S.Pd, Veni Murna Putri S.Ip dan Husni Thambrin S.Pd serta untuk seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH. MH selaku Wakil Dekan II, dan Bapak DR. Kurnia Warman, SH. MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman, SH.MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti, SH. MH sebagai pembimbing I dan Bapak Charles Simabura, SH. MH sebagai pembimbing II, yang telah memberi masukan dan bimbingan kepada penulis agar penulisan skripsi ini berhasil dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan membantu penulis dalam selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta seluruh Staf Biro dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Kepada Bapak Drh. Harmen selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberikan masukan, data-data dan keterangan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Husin, SH. M.Si selaku sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Budi Jonhendri, SE selaku kasubag keuangan dan Ibu Mayke Sahirman selaku staf kasubag risalah yang telah memberikan data-data dan keterangan-keterangan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis Benny Dahna, Dini Wahyuni SH, Emo, Ilham SH, Nanda SH, Vista Anggarda P SH, Riola Wulan Dhany Putri SH, Engla Puspita Haria SH, Ziffany Firdinal, Andi Suhendra, karena telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis.
8. Serta semua teman-teman angkatan 2008 di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Lembaga Perwakilan.....	14
B. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1. Dasar Hukum dan Pengertian Fungsi Anggaran DPRD.....	18
2. Asas Umum APBD.....	20
3. Tahap-Tahap Penyusunan APBD.....	21
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
1. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	29
2. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	31
3. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Bidang Anggaran.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011.....	42
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran.....	55

C. Upaya yang Dilakukan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Menyelesaikan Kendala Pelaksanaan Fungsi Anggaran.....	59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN